



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 524 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 724 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 22 April 2022 maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 724 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 724 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran I, II dan IV Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 724 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 25 April 2022.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Agustus 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 524 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 724 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SEKRETARIAT DAERAH

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN	NAMA/NIP	KEWENANGAN
	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN	
1	YUSNA IRAWAN, S.E., M.Eng. NIP.19721222 200003 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN UMUM	YUSNA IRAWAN, S.E., M.Eng. NIP.19721222 200003 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN UMUM
2	THOMAS SIGIT MUGIARTO, S.Pd., S.T., M.A. NIP.19740709 199903 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	THOMAS SIGIT MUGIARTO, S.Pd., S.T., M.A. NIP.19740709 199903 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
3	DR. H. LUKMAN FADLUN, S.H., M.H. NIP.19691013 200003 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN HUKUM	JEFRIE FRANSYAH, S.H. NIP.19841019 201001 1 012	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN HUKUM
4	Drs. H. KHAIRIL HIDAYAT, M.Si NIP.19660421 198602 1 002	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Drs. H. KHAIRIL HIDAYAT, M.Si NIP.19660421 198602 1 002	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
5	SIANE APRILIAWATI, S.Hut., MM NIP.19740418 200003 2 007	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	SIANE APRILIAWATI, S.Hut., MM NIP.19740418 200003 2 007	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
6	ENDRI, A.P., M.A.P. NIP.19750812 199412 1 005	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ORGANISASI	ENDRI, A.P., M.A.P. NIP.19750812 199412 1 005	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ORGANISASI
7	H. MUHAMMAD IRWAN ANSHARI, S.E., M.M. NIP.19710204 199903 1 005	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	NURDIN MUBARAK, S.Sos., M.AP. NIP.19640815 198711 1 002	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN	NAMA/NIP	KEWENANGAN
	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN	
8	Drs. HUSIN LUTHFIE, M.Si NIP.19670117 199003 1 008	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Drs. HUSIN LUTHFIE, M.Si NIP.19670117 199003 1 008	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
9	Drs. DOLLY SYAHBANA, M.M. NIP.19660601 198602 1 009	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PEMERINTAHAN	Drs. DOLLY SYAHBANA, M.M. NIP.19660601 198602 1 009	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PEMERINTAHAN
10	INGE AGNESTASIA, A.Md NIP.19891018 201001 2 002	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN UMUM	ELLY SORAYA, A.Md NIP. 19871219 201101 2 005	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN UMUM
11	MAHRITA YANI, A.Md. NIP.19830615 201001 2 015	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	MAHRITA YANI, A.Md. NIP.19830615 201001 2 015	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
12	SRI ULFAH HERMILA, A.MA NIP.19781020 200801 2 025	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN HUKUM	SRI ULFAH HERMILA, A.MA NIP.19781020 200801 2 025	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN HUKUM
13	SILVIA DESMALINA, A.Md NIP.19861230 201001 2 014	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SILVIA DESMALINA, A.Md NIP.19861230 201001 2 014	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
14	SITI NURHASANAH, A.Md. NIP.19890117 201001 2 001	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	SITI NURHASANAH, A.Md. NIP.19890117 201001 2 001	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
15	YAMANI, A.Md. NIP.19870102 201101 1 003	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN ORGANISASI	YAMANI, A.Md. NIP.19870102 201101 1 003	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN ORGANISASI
16	SITI HIDAYATUN NAZILA, A.Md. NIP.19820709 201502 2 002	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SITI HIDAYATUN NAZILA, A.Md. NIP.19820709 201502 2 002	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
17	AHMAD SOFA ANWARI, A.Md NIP.19870129 201001 1 002	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	AHMAD SOFA ANWARI, A.Md NIP.19870129 201001 1 002	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN	NAMA/NIP	KEWENANGAN
	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN	
18	RAHMATUL JANNAH, A.Md. NIP.19870326 201001 2 006	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PEMERINTAHAN	RAHMATUL JANNAH, A.Md. NIP.19870326 201001 2 006	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PEMERINTAHAN

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 524 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 724 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 DINAS PENDIDIKAN

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN	NAMA/NIP	KEWENANGAN
	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN	
1	NURYADI, S.Pd., M.A. NIP.19670413 198804 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG PEMBINAAN SD	ISNOOREDY, S.E. NIP.19731226 200501 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG PEMBINAAN SD
2	SAIPUDDIN ZUHRI, S.Pd., M.M. NIP.19650904 198902 1 003	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG PEMBINAAN SMP	SAIPUDDIN ZUHRI, S.Pd., M.M. NIP.19650904 198902 1 003	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG PEMBINAAN SMP
3	EDY JUNAIDI, S.Pd., M.A. NIP.19780912 200501 1 012	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG PAUD DAN PNFI	EDY JUNAIDI, S.Pd., M.A. NIP.19780912 200501 1 012	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG PAUD DAN PNFI
4	YESI PETIKASARI, S.T. NIP.19801203 201101 2 001	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG PEMBINAAN SD	YESI PETIKASARI, S.T. NIP.19801203 201101 2 001	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG PEMBINAAN SD
5	INSAN HANDAYANI, A.Md. NIP.19810315 201001 2 008	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG PEMBINAAN SMP	INSAN HANDAYANI, A.Md. NIP.19810315 201001 2 008	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG PEMBINAAN SMP

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN	NAMA/NIP	KEWENANGAN
	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN	
6	DEWI SUTANTI, A.Md. NIP.19890715 201101 2 004	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG PAUD DAN PNFI	DEWI SUTANTI, A.Md. NIP.19890715 201101 2 004	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG PAUD DAN PNFI

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 524 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 724 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN	NAMA/NIP	KEWENANGAN
	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN	
1	-	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG JALAN	DEDY HAMDANI, S.T., M.T. NIP.19750127 200501 1 010	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
2	-	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG SUNGAI	RINI WARDINA, S.E., M.T. NIP.19751120 200003 2 003	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG SUNGAI
3	-	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG DRAINASE	HIZBULWATHONI, S.T. NIP.19750513 200604 1 013	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG DRAINASE
4	-	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI	SUYATNO, S.T., M.S. NIP.19680803 200003 1 008	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI
5	-	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG JALAN	SITI KHADIJAH NIP.19701117 200604 2 008	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
6	-	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG SUNGAI	SITI SAIDATUL MUKHLISAH, A.Md. NIP.19840706 200501 2 003	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG SUNGAI
7	-	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG DRAINASE	ARIENA MASHUNAH, S.Hut. NIP.19791114 200902 2 004	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG DRAINASE

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN	NAMA/NIP	KEWENANGAN
	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN	
8	-	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI	MUHAMMAD NOOR, A.Md. NIP.19830930 201001 1 012	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA